

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Dinamika Tenaga Kerja Indonesia

Dalam sejarah ketenagakerjaan, para ahli menyebutkan bahwa globalisasi merupakan alasan terjadinya proses kerjasama ketenagakerjaan. Hal tersebut tentunya didasari apabila ada hubungan regional, bilateral, atau bahkan multilateral. Negara-negara di dunia tentunya memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berbeda sehingga adanya hubungan kerjasama akan membuka peluang antar negara untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. Hal tersebutlah yang mendasari terjadinya pengiriman tenaga kerja sebagai salah satu proses dalam perdagangan internasional.

Migrasi internasional Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari masa kolonialisme dan Orde Lama, TKI menjadi sasaran utama negara-negara besar, khususnya negara industri. Hal ini disebabkan karena negara industri tersebut tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tetapi hanya membutuhkan tenaga dengan sedikit keterampilan sebagaimana TKI yang mempunyai etos kerja rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya (Nasution, 1999).

Migrasi tenaga kerja Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan. Pada tahun 1887, pekerja Indonesia dikirim ke beberapa negara jajahan seperti Kaledonia, Suriname, serta Belanda. Selama periode tersebut, pekerja Indonesia dipekerjakan

dengan paksa sebagai kuli. Kebanyakan para pekerja ditempatkan di sektor perkebunan yang dimiliki penjajah (Irewati, 2003). Pada abad ke-20, migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia terjadi secara besar-besaran dikarenakan pada saat itu Malaysia masih dalam jajahan Inggris dan banyak pemodal Inggris yang membutuhkan tenaga kerja di lahan yang mereka miliki (Nasution, 1997). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1947, terbentuklah Lembaga Kementerian Perburuhan yang membuka jalan bagi para buruh untuk masuk ke bidang politik.

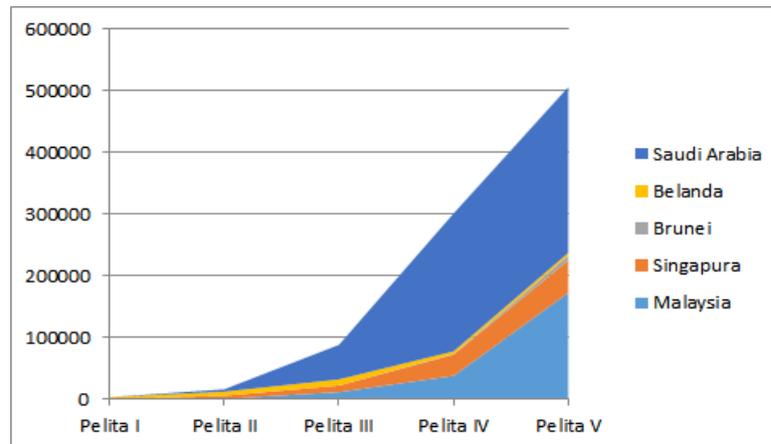
Pada tahun 1966, Presiden Soeharto mulai fokus dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pada masa ini, sumber daya alam berupa minyak bumi menjadi sumber kekuatan yang cukup kuat pengaruhnya terhadap tumbuhnya investasi asing di Indonesia sehingga migrasi tenaga kerja Indonesia tidak lagi menjadi penopang ekonomi. Pada tahun 1983, pemerintah melakukan perombakan kebijakan sebagai langkah dalam meningkatkan pendapatan luar negeri yang turun diakibatkan harga minyak dunia yang jatuh. Alhasil, pemerintah Indonesia membangun perekonomian yang berbasis tenaga kerja murah sehingga menarik investor asing untuk menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia (Tirtosudarmo, 2002). Kebijakan tersebut tentunya terjadi akibat tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Di masa Orde Baru, Kementerian Perburuhan diganti menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970. Depnaker kemudian membuat kebijakan untuk mengurangi pengiriman tenaga kerja tidak terdidik dan meningkatkan pengiriman tenaga kerja terdidik. Hal ini

disebabkan karena banyaknya masalah yang terjadi pada tenaga kerja tidak terdidik, seperti: pelecehan seksual, kekerasan, bahkan dipulangkan. Peraturan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah dan pihak swasta untuk mengatur jalannya proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Irewati, 2003).

Pada tahun 1988, jumlah migrasi TKI yang dikirim ke Arab Saudi semakin meningkat. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan No. 1307 mengenai petunjuk teknis pengarahan TKI ke Arab Saudi. Arab Saudi menjadi negara tujuan utama TKI untuk bekerja di sektor domestik (Nasution, 1999). Sementara pada awal dekade 80-an, migrasi tenaga kerja Indonesia cenderung meningkat di Malaysia untuk sektor perkebunan dan konstruksi melalui perjanjian kesepakatan mengenai pengaturan aliran migrasi dari Indonesia ke Malaysia pada tanggal 12 Mei 1984 yang dikenal sebagai Medan Agreement (Susilo *et al*, 2013).

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke Saudi Arabia, Malaysia, dan Singapura pada Pelita I hingga Pelita VI. Peningkatan ini membuktikan bahwa pengiriman TKI menjadi kebijakan Soeharto dalam menangani masalah pengangguran yang terjadi pada masa Orde Baru sesuai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).



Sumber: Tjiptoherijanto, 1999 (diolah)

Gambar 4.1.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia pada Masa Orde Baru

Pada masa reformasi, Presiden Habibie menggantikan posisi Soeharto. Masa pemerintahan Presiden Habibie terbilang sangat cepat namun memiliki sejarah yang cukup baik untuk Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Indonesia masih berada pada Pelita VI. Pada masa ini, dampak krisis moneter berdampak pada meningkatnya pengiriman TKI dari 500.000 orang tenaga kerja pada Pelita V menjadi 1.250.000 orang. Hal tersebut dikarenakan oleh krisis tahun 1997 yang menyebabkan banyaknya penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan mereka (Sabhana, 2012).

Pertumbuhan tenaga kerja wanita tetap mendominasi apabila dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.1. Bisa dikatakan perbedaan jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin ini cukup timpang antara laki-laki dan perempuan, bahkan pada tahun 2001, selisih antara pekerja perempuan dan laki-laki sangat jauh.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 1999-2001

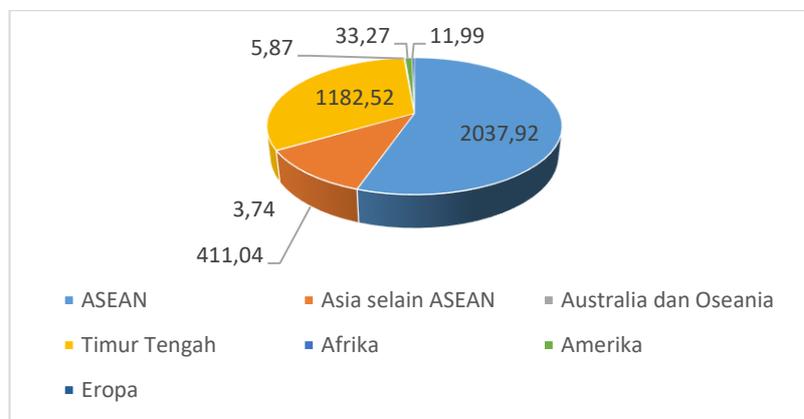
Tahun	Perempuan	Laki-Laki
1999	203.791 Jiwa	124.828 Jiwa
2000	297.273 Jiwa	137.494 Jiwa
2001	239.942 Jiwa	55.206 Jiwa

Sumber: Susilo, 2013 (diolah)

Memasuki awal masa kepemimpinan Presiden Megawati, kondisi migrasi Indonesia mengalami peristiwa besar dengan dipulangkannya sebagian besar tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Hal tersebut ditandai dengan keluarnya Akta Imigresen No. 1154 Tahun 2002 yang mengharuskan para migran ilegal membayar 10.000 ringgit Malaysia dan dihukum penjara maksimal lima tahun dengan enam kali hukuman cambuk. Hal tersebut yang melatarbelakangi Megawati membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), tingginya angka migrasi TKI ke luar negeri berbanding lurus dengan tingginya tingkat pengangguran. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa masalah perekonomian Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan masih belum teratasi. Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah dengan masuknya uang dari pengiriman tenaga kerja seharusnya ditopang dengan meningkatnya perlindungan terhadap migran yang bekerja. UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN yang dibuat pada masa Megawati dilaksanakan

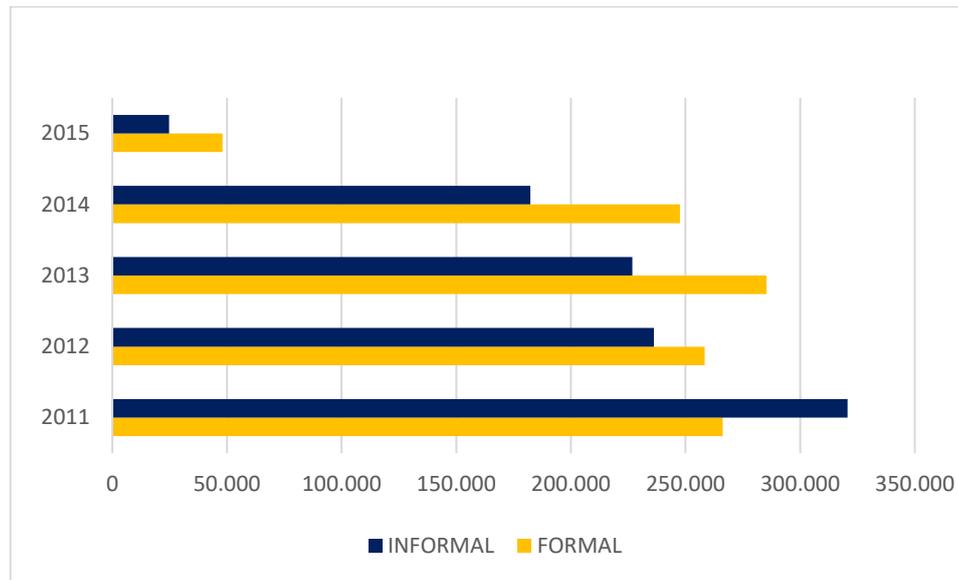
pada era pemerintahan SBY. Masa SBY merupakan masa yang paling banyak mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan mobilitas migrasi. Pada pemerintahan SBY yang kedua, jumlah migrasi internasional terus meningkat pesat. Terdapat 280.690 migran Indonesia pada tahun 2004, 474.310 migran pada tahun 2007, 561.241 pada tahun 2008, dan yang terakhir pada tahun 2009 sebesar 632.172 (Sabhana, 2012).



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4.2.
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia menurut Negara Penempatan dalam Satuan Ribu Jiwa Tahun 2015

Pada saat ini, TKI lebih banyak memilih untuk bekerja di negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Pada tahun 2015, sebanyak 2,04 juta jiwa Tenaga Kerja Indonesia lebih memilih untuk bekerja di negara-negara ASEAN terutama Malaysia sebanyak 1,88 juta jiwa, disusul Singapura sebanyak 120 ribu jiwa. Timur Tengah menjadi tempat favorit kedua setelah ASEAN untuk mencari pekerjaan, terbukti dengan jumlah TKI yang bermigrasi sebesar 1,12 juta jiwa pada tahun 2015. Arab Saudi menjadi negara tujuan utama TKI untuk bekerja yang diikuti oleh Uni Emirat Arab sebanyak 75 ribu jiwa.

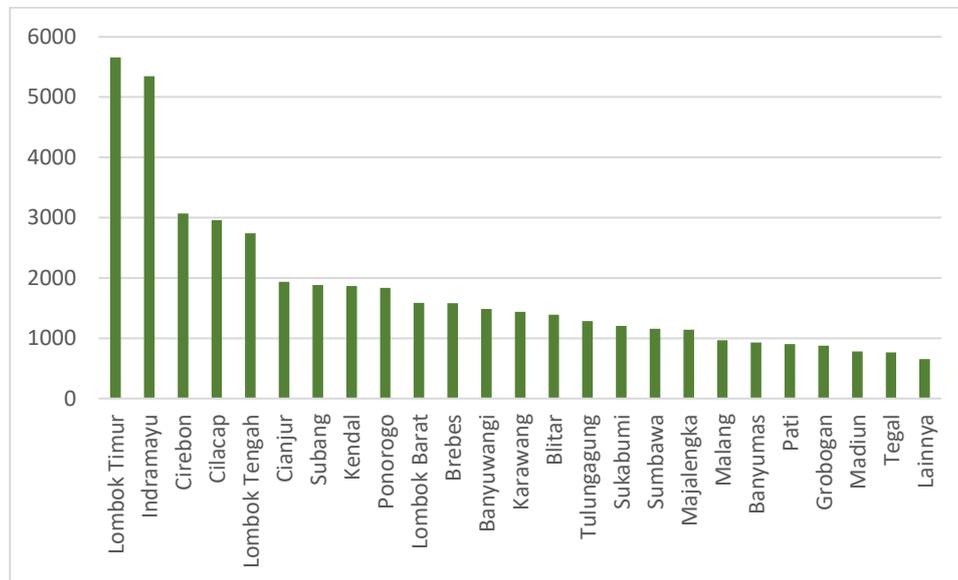


Sumber: BNP2TKI Tahun 2015 (diolah)

Gambar 4.3.
Penempatan Tenaga Kerja menurut Sektor Penempatan
Tahun 2011-2015

Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja migran pada sektor formal. Sektor formal meliputi pekerja yang bekerja di pabrik, perkebunan/pertanian, konstruksi, konsultan, akuntan, guru/dosen, dokter, dan tenaga medis. Sedangkan kelompok informal meliputi pekerja rumah tangga. Dimulai pada tahun 2012, sektor formal mendominasi lalu turun drastis pada tahun 2015. Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada sektor formal, tetapi juga semua sektor terlihat menurun sangat banyak pada tahun 2015. Menurut BNP2TKI, penurunan ini disebabkan oleh pembenahan penempatan TKI pada beberapa negara seperti Timur Tengah, terutama ketika berlakunya moratorium TKI informal yang bekerja di sektor rumah tangga. Selain hal tersebut, penurunan jumlah TKI ini juga

disebabkan oleh pengetatan syarat dalam bekerja seperti pemberlakuan durasi kerja yang dilakukan dengan *finger print*.



Sumber: BNP2TKI

Gambar 4.4.
Jumlah TKI berdasarkan Asal Kabupaten per Maret 2015

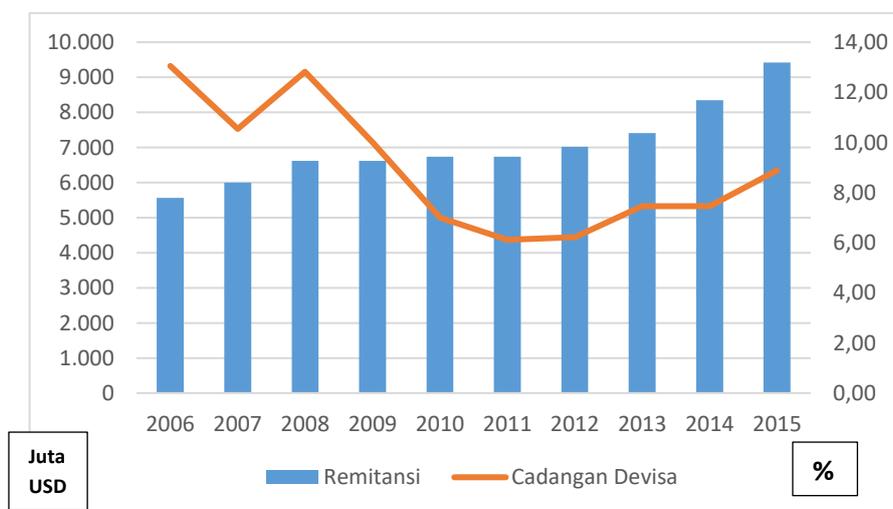
Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi di mana terdapat beberapa kabupatennya seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Sumbawa yang paling banyak dalam hal pengiriman TKI. Lombok Timur menjadi kabupaten dengan jumlah TKI terbanyak, yakni sebesar 5.561 jiwa, lalu diikuti oleh Indramayu sebesar 5.347 jiwa. Sementara itu, Tegal merupakan kabupaten pengirim TKI terendah, yaitu sebanyak 766 jiwa.

B. Remitansi

Remitansi memiliki beberapa pengaruh positif terhadap perekonomian sebuah negara. Beberapa dampak positif yang akan terjadi berupa peningkatan

inklusifitas keuangan, penurunan angka kemiskinan, dan tentunya penambahan cadangan devisa dari negara penerima remitansi.

Berdasarkan data perkembangan remitansi terhadap cadangan devisa pada Gambar 4.4, jumlah remitansi terus mengalami kenaikan tiap tahunnya mulai dari tahun 2006 sebesar USD 5.560 juta, lalu cenderung stagnan pada tahun 2008 hingga 2012, hingga tahun 2013 mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar USD 7.018 juta, dan puncaknya pada tahun 2015 sebesar USD 9.418 juta. Sementara itu, kontribusi remitansi terhadap cadangan devisa Indonesia pada tahun 2006 mencapai 13,05%, lalu menurun hingga nilai terendah pada 2011 sebesar 6,5%, dan mulai mengalami kenaikan hingga 8,89% pada tahun 2015.

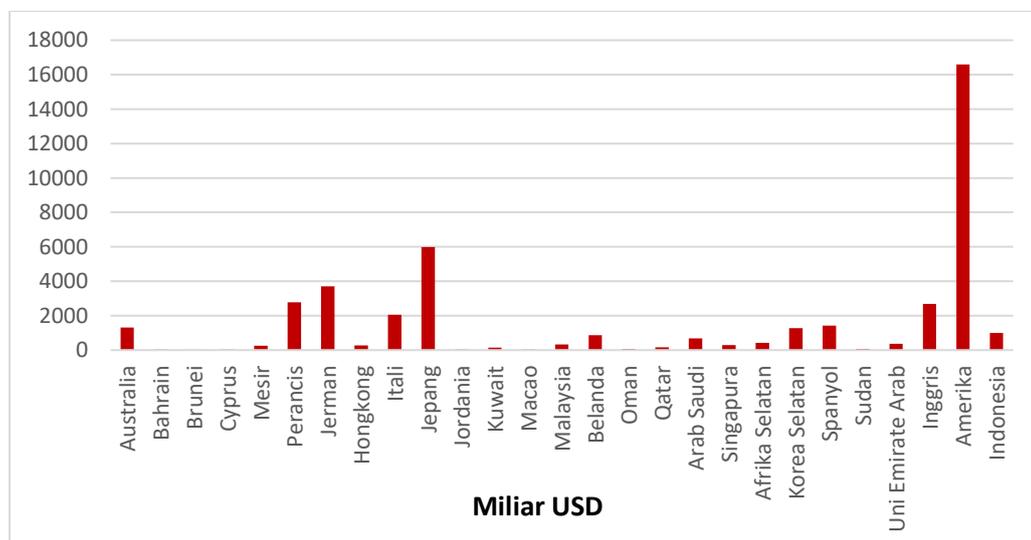


Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4.5
Kontribusi Remitansi terhadap Cadangan Devisa Indonesia
Tahun 2006- 2015

C. Produk Domestik Bruto (PDB)

Kondisi ekonomi yang baik dapat dilihat dari ukuran ekonomi suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi salah satu cara yang tepat dalam melihat ukuran sebuah negara dari segi perekonomian mengingat PDB merupakan nilai akhir barang atau jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. Hal itulah yang menjadikan PDB sebagai indikator ukuran ekonomi suatu negara karena semakin besar ekonomi suatu negara semakin besar pula aktivitas ekonominya.



Sumber: *World Bank*

Gambar 4.6.

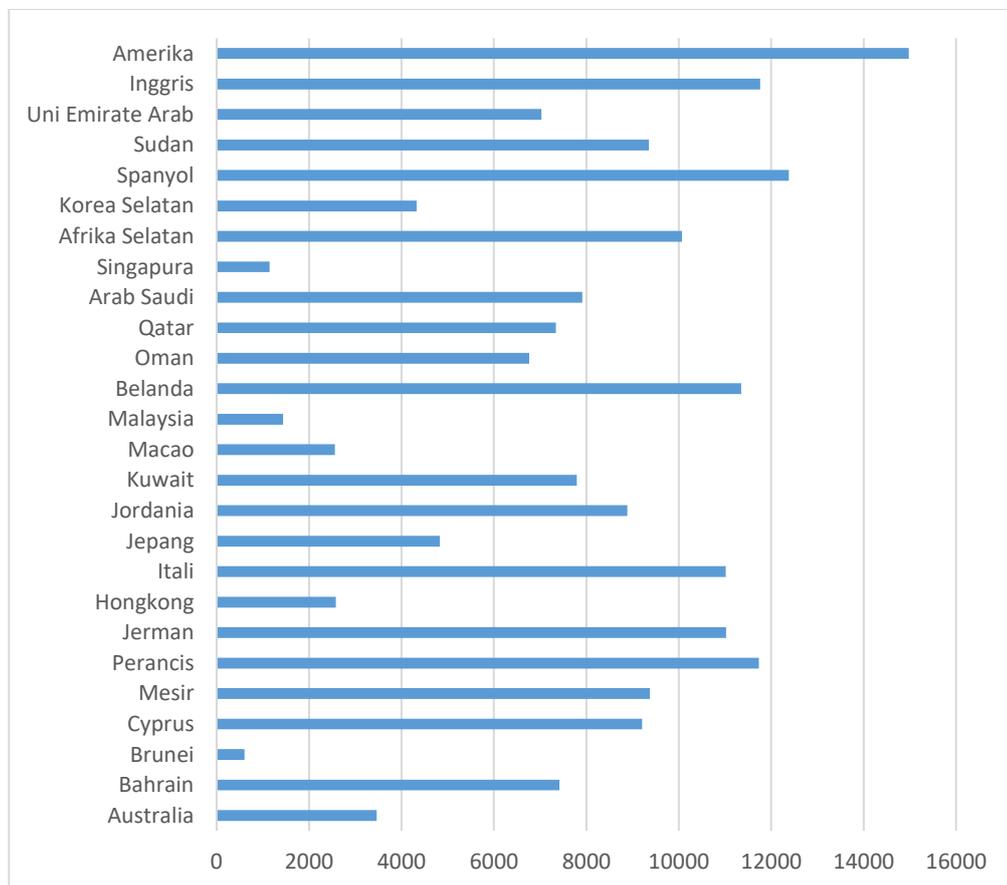
Produk Domestik Bruto Indonesia dan Negara Tujuan Migran Indonesia Tahun 2015

Pada grafik di atas, Amerika menjadi negara mitra dagang Indonesia yang memiliki PDB tertinggi dibanding negara lainnya, yakni sebesar 16.597 miliar USD, lalu di posisi kedua yaitu Jepang dengan 5.986 miliar USD dan selanjutnya diikuti

Jerman dan Perancis. Indonesia menjadi negara dengan PDB tertinggi diantara mitra dagangnya di wilayah ASEAN, yakni sebesar 988 miliar USD.

D. Jarak

Jarak akan menentukan keputusan tenaga kerja untuk bermigrasi. Apabila jarak negara asal dengan negara tujuan semakin jauh tentunya akan menghambat keputusan migran, begitu juga sebaliknya.



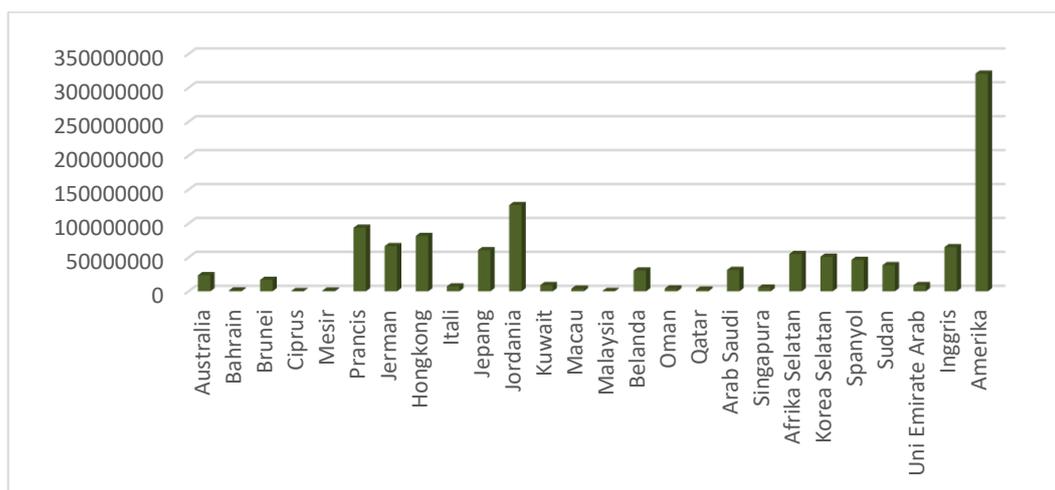
Sumber: Distancefromto.net

Gambar 4.7.
Jarak Indonesia dengan Negara Tujuan Migran Indonesia

Amerika Serikat menjadi negara tujuan migran Indonesia terjauh dengan jarak 14.979 km, lalu disusul Inggris di posisi kedua sejauh 11.762 km. Negara tujuan migran terdekat Indonesia adalah Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia yang posisinya memang sangat dekat dengan Indonesia, yakni masing-masing sejauh 600 km, 1.149 km, dan 1.441 km jika diukur dari ibukota masing-masing negara.

E. Populasi

Jumlah populasi suatu negara menjadi salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mutu sumber daya manusianya. Dari 26 negara tujuan TKI Indonesia, Amerika menjadi negara dengan populasi terbesar, yakni sebanyak 320.896,616 jiwa, yang diikuti oleh Jordania sebesar 127.141.000 juta jiwa. Cyprus dan Mesir menjadi negara dengan jumlah populasi terendah di antara negara-negara tujuan migran Indonesia, yakni masing-masing sebesar 417.542 jiwa dan 1.160.985 jiwa.



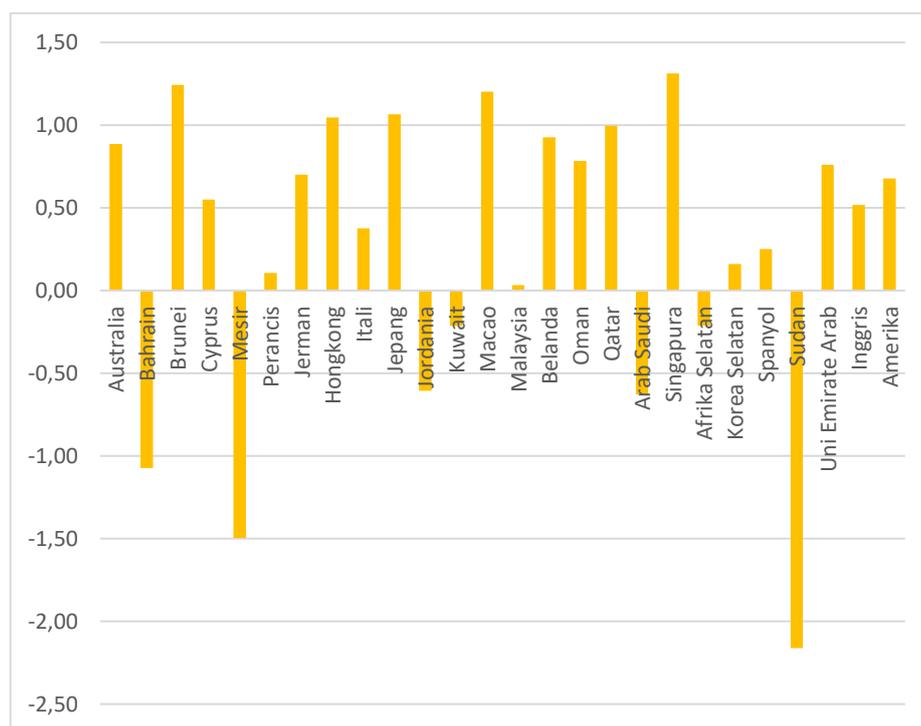
Sumber: *World Bank*

Gambar 4.8.

Jumlah Populasi di Negara Tujuan Migran Indonesia Tahun 2015

F. Indeks Stabilitas Politik

Dalam sebuah kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi harus mampu melihat kondisi perekonomian suatu negara guna mengantisipasi segala risiko yang akan terjadi. Agregat nilai yang digunakan dalam mengukur Indeks Stabilitas Politik berkisar -2,5 sampai 2,5. Semakin besar indeksnya, maka semakin stabil keadaan politik negara tersebut sehingga risiko politik dan keamanan yang akan terjadi ketika para pekerja memutuskan untuk bekerja di negara tujuan akan semakin kecil.



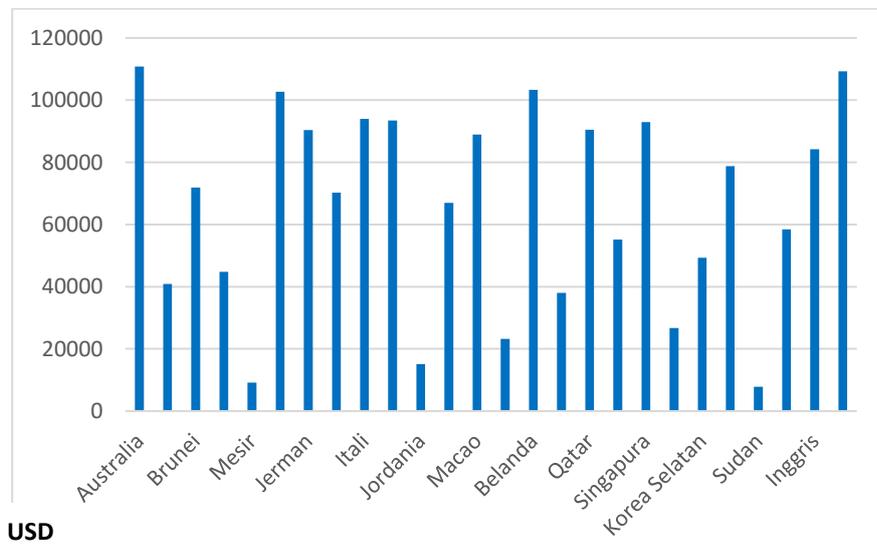
Sumber: *World Bank*

Gambar 4.9.
Indeks Stabilitas Politik Negara Tujuan Migran Indonesia
Tahun 2015

Sudan, Mesir, dan Bahrain adalah negara dengan Indeks Stabilitas Politik terendah di antara seluruh negara tujuan migran Indonesia, yakni masing-masing sebesar -2,16, -1,50, dan -1,07. Negara dengan indeks stabilitas tertinggi ditempati oleh negara tetangga Indonesia, yakni Singapura dengan indeks 1,31, lalu diikuti Brunei sebesar 1,24.

G. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan pendapatan tenaga kerja yang nantinya akan berpengaruh pada pengiriman uang yang dilakukan ke negara asal sehingga menjadi tolok ukur yang cukup kuat dalam mempengaruhi pendapatan tenaga kerja.



Sumber: ILOSTAT

Gambar 4.10.
Produktivitas Tenaga Kerja Negara Tujuan Migran Indonesia
Tahun 2015

Negara dengan tingkat produktivitas tertinggi diduduki oleh Australia dan Amerika Serikat. Australia mengungguli Amerika Serikat dengan angka 110.818 USD, sementara itu Amerika Serikat sebesar 109.304 USD. Mesir dan Sudan menjadi negara tujuan migran Indonesia dengan produktivitas tenaga kerja terendah, yakni masing-masing sebesar 9.146 USD dan 7.799 USD. Singapura menjadi negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi di ASEAN, yakni sebesar 92.927 USD.